

Judul : Duh, Sektor Kelautan Maluku Sudah 7 Tahun Mati Suri Tuh
Tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pejabat Jarang Turun Ke Lapangan

Duh, Sektor Kelautan Maluku Sudah 7 Tahun Mati Suri Tuh

SENAYAN meminta pemerintah memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan di kawasan Papua dan Maluku. Dua kawasan tersebut tidak tergarap dengan baik lantaran tidak ada sentuhan dari pemerintah. Pelaku usaha dan ekonomi di sektor ini cenderung dibiarkan berjuang sendirian.

Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J Kardinal mengatakan, sektor kelautan di kawasan Indo-

nesia Timur khususnya Papua dan Maluku selama ini mati suri selama 7 tahun.

"Nelayan bertahan secara auto pilot lantaran kementerian tidak punya rencana yang baik dalam memajukan kawasan ini," tegas Robert dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Padahal, potensi kelautan dan perikanan di kawasan paling timur Indonesia ini luar biasa, khususnya untuk ekspor.

Sayang, tidak terjamah dengan baik. Di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kesejahteraan nelayan utamanya di Papua melorot. Banyak izin kapal tangkap ikan di-stop.

Pemerintah, lanjutnya, cenderung mempersulit izin baik kapal tangkap muatan kecil maupun besar untuk bisa beroperasi.

"Tidak ada pendampingan juga bagi pelaku budi daya laut. Akhirnya nelayan berjuang sendiri.

Sehingga tidak ada perkembangan apa-apa," jelas politisi daerah pemilihan Papua Barat ini.

Begitu juga di periode kedua Pemerintahan Jokowi. Ini terjadi lantaran Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya maupun sekarang tidak memiliki program nyata di sektor kelautan dan perikanan. Sementara, kawasan ini memiliki potensi perikanan luar biasa, utamanya Tuna.

"Percuma teriak banyak kapal asing dan ilegal masuk ke perairan kita, sementara nelayan kita tidak bisa apa-apa," katanya.

Karena itu, dia tidak heran kalau perairan Indonesia utamanya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif menjadi surga bagi kapal asing. Sebab, pelaku usaha maupun nelayan kita tidak punya kemampuan memaksimalkan perikanan tangkap di kawasan ini lantaran tidak memiliki armada kapal yang memadai.

"Sekarang berapa coba nelayan kita yang menjadikan ZEE sebagai lokasi tangkap? Tidak ada, karena hanya kapal-kapal saja yang bisa ke sana," kata eks Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.

Ironinya, lanjut dia, industri kapal untuk armada besar ternyata terbilang mahal di dalam negeri. Makanya banyak pelaku usaha akhirnya lebih memilih membeli kapal perikanan buatan China. Tidak hanya itu, bantuan kredit untuk sektor ini terbilang

berat. Lantaran bunga bank sangat tinggi, di atas 10 persen.

Kondisi ini kontras dengan kebijakan Pemerintahan China dan Hong Kong yang berani memberikan kredit bunga rendah untuk nelayannya. Alhasil, sektor kelautan dan perikanan mereka memberi kontribusi sangat besar bagi perekonomian.

Anggota Komisi X DPR ini menegaskan, kalau tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan negara untuk sektor ini, maka jungan bermimpi nelayan-nelayan kita menjadi menjadi raja di laut sendiri. "Ini tugas Menteri Kelautan dan Perikanan, tapi mana konsep besarnya?" sesal Robert.

Karena itu, dia meminta pemerintah lebih fokus pada peningkatan perekonomian negara melalui sektor kelautan dan perikanan ini. Sektor ini sulit bergerak jika teknologi yang digunakan masih seperti nelayan-nelayan tradisional pada umumnya. "Sekarang menteri-nya harus buat program, turun ke lapangan kayak Pak Jokowi," tegasnya.

Sayangnya, Robert melihat menteri-menteri sekarang tidak pernah menyentuh ke kawasan pesisir dan laut Papua dan Maluku seperti Merauke, Biak, Sorong, Tual dan sekitarnya.

"Jangankan menteri, pejabat Eselon I saja tidak pernah turun ke Papua. Paling Ambon, Jayapura, lalu balik lagi ke Jakarta," tambah dia. ■ KAL



ANTARA FOTO/Aprilio Albarnew

LEPAS PENYALURAN BSNT: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) melepas penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) berupa beras di Gudang Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta, kemarin. Dinas Sosial DKI Jakarta kembali mendistribusikan BSNT berupa beras mulai 29 Juli-17 Agustus 2021 kepada 1.007.379 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di lima wilayah Kota Administrasi dan Kepulauan Seribu.